

Meningkatkan Kinerja Sekolah Dan Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Siswa Melalui Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

F Budi Santoso

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Corresponding Author: bustapbg02@students.unnes.ac.id

Abstrak. Pemerintah pusat memberikan dana pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dalam penggunaan di satuan pendidikan akan kesulitan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) mengacu pada petunjuk teknis bukan mengacu pada raport mutu sekolah. Maka dalam pelaksanaannya sekolah tidak punya kemampuan untuk mengoptimalkan dana BOS maupun BOSDA untuk membangun sekolah yang berkualitas. Kurangnya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, maka penulis merumuskan masalah pada model penelitian pengembangan (R&D) “belum optimalnya sekolah dalam penggunaan dana bantuan pemerintah sebagai upaya biaya pendidikan gratis” dengan judul “meningkatkan kinerja sekolah dan menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa melalui pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah kejuruan”. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat kerangka kinerja sekolah berbiaya gratis dengan menetapkan tingkatan kinerja sekolah berkelanjutan pada tiga sekolah menengah kejuruan negeri di provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian mengidentifikasi kerangka paling cocok untuk mengukur keberlanjutan indek gabungan dari tata letak kinerja sekolah dengan Data dan Sumber Penelitian; Studi kasus; 3 smk yang berbeda, Tipe data; rencana tata letak digital, Sumber; otoritas perencanaan lokal, Data verifikasi; groundthruing SMK. Teknik Pengumpulan Data berupa data Kuesioner; uji coba untuk pelaksanaan dan Teknik Keabsahan Data: Responden; SMK Negeri di Jawa Tengah dengan Jumlah putaran; 3 sekolah. Teknik pengolahan data dengan statistika deskriptif, statistika inferensial dan interpretative analysis.

Kata kunci: optimalisasi bos/bosda untuk meningkatkan kinerja

Abstract. The central government provides education funds in the form of School Operational Assistance (BOS) and provincial or district/city governments in the form of Regional School Operational Assistance (BOSDA). In use in education units, it will be difficult to prepare the School Activity Plan and Budget (RKAS) referring to technical instructions, not referring to school quality report cards. So, in its implementation, schools do not have the ability to optimize BOS and BOSDA funds to build quality schools. Lack of government in preparing human resources through the education sector, the authors formulate problems in the research development (R&D) model; “Schools Are Not Optimized In Use Of Government Assistance Funds As A Free Education Cost Efforts” With The Title “Increasing School Performance And Growing The Entrepreneurs Of Students Through Free Education At Vocational High School”. The purpose of this study is to create a free-cost school performance framework by determining the level of sustainable school performance in three public vocational high schools in the province of Central Java. Research focus ; identify the most suitable framework for measuring the sustainability of the combined index of school performance layout with Research Data and Sources; Case study; 3 different smk, data type; digital layout plan, Source; local planning authority, Data verification; ground-truthing SMK. Data collection techniques in the form of questionnaire data; trials for implementation and Data Validity Techniques: Respondents; State Vocational Schools in Central Java by Number of rounds; 3 schools. Data processing techniques with descriptive statistics, inferential statistics and interpretive analysis.

Key words: optimization of bos/bosda to improve performance

How to Cite: Psantoso, F. B. (2021). Meningkatkan Kinerja Sekolah dan Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Siswa Melalui Pendidikan Gratis pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2021, 234-237.

PENDAHULUAN

Sektor Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, maka keberhasilan pembangunan sektor pendidikan menjadi tolok ukur pembangunan sektor lainnya. Dalam pembangunan suatu negara pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk membawa negara tersebut dalam memetakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, sehingga dalam

pendidikan terjadi proses mencetak generasi muda dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia termasuk negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Mutu pendidikan menjadi permasalahan besar negara, rendahnya mutu pendidikan menjadi penghambat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di segala bidang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang ;

Mahalnya biaya pendidikan;

Mayoritas penduduk di Indonesia perekonomiannya berada di bawah garis kemiskinan, mereka mengesampingkan pendidikan dalam kehidupannya. Kemauan dan kesadarannya sangat rendah akan pentingnya pendidikan untuk bisa bangkit dari garis kemiskinan.

Pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, akan tetapi biaya-biaya pendukung yang harus dibayarkan oleh masyarakat tidaklah murah. Apalagi keadaan perekonomian Indonesia yang tidak menentu, ternyata sangat menentukan struktur biaya yang harus dibayarkan mereka dalam menghadapi kehidupan. Kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sebanding dengan tingkat inflasi yang tinggi, sehingga kebanyakan masyarakat miskin lebih memilih mencari nafkah untuk kehidupan daripada mengenyam bangku pendidikan yang ujung-ujungnya juga susah mencari sumber nafkah untuk kehidupan,

Fasilitas pendidikan yang kurang memadai;

Sudah menjadi permasalahan klasik dan bersifat menahun bahwa fasilitas pembelajaran berupa sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di bidangnya selalu terbatas dan tidak pernah sejalan dengan perkembangan teknologi terkini. Fasilitas pendidikan selalu tertinggal satu dekade dari dekade yang saat ini berjalan. Pembelajaran di sekolah-sekolah cenderung sastra yaitu pembelajaran praktek yang hanya membayangkan praktek di industri melalui video animasi ataupun pembelajaran praktek dengan peralatan praktek terbatas, misalnya; 1 alat praktek di gunakan untuk lebih dari 10 anak atau bahkan 30 anak, sehingga pendidikan tidak berkembang secara optimal

Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan;

Pendidikan di Pulau Jawa dengan Pulau lain terjadi ketimpangan yang sangat jauh, ataupun pendidikan di perkotaan dan pendidikan di pedesaan. Sehingga kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota sangat berbeda dengan sekolah yang berada di desa atau daerah terpencil, apalagi dalam hal kualitas dan kesejahteraan guru yang mengajar di daerah- daerah tersebut. Jadi tidak menjadi alasan yang salah bila masyarakat menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan di pulau Jawa maupun di kota lebih baik daripada kualitas pendidikan di luar pulau Jawa ataupun desa-desa yang berada di daerah terpencil. Inilah yang dikatakan sebagai potret pendidikan di Indonesia yang pelaksanaan pembangunannya tidak merata.

Belum optimalnya sekolah dalam penggunaan dana bantuan pemerintah sebagai upaya biaya pendidikan gratis;

Pemerintah pusat dalam upaya memberikan tanggung jawab terhadap pendidikan berupa penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota berupa bantuan operasional sekolah daerah (bosda). Dalam penggunaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah membatasinya dengan mengeluarkan petunjuk teknis. Sehingga dalam penggunaan di satuan pendidikan akan kesulitan apabila dalam penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) belum sepenuhnya mengacu pada raport mutu. Maka dalam pelaksanaannya sekolah belum punya kemampuan untuk mengoptimalkan dana BOS maupun bosda untuk membangun sekolah yang berkualitas (biaya pendidikan gratis). Dari kualitas tersebut akan terukur kinerja sekolah dalam pemanfaat dana BOS dan BOSDA untuk menumbuhkan entrepreneur siswa dengan biaya pendidikan gratis.

Pemerintah pusat dalam upaya memberikan tanggung jawab terhadap pendidikan berupa penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dalam penggunaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah membatasinya dengan mengeluarkan petunjuk teknis. Sehingga dalam penggunaan di satuan pendidikan akan kesulitan apabila dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) belum sepenuhnya mengacu pada raport mutu. Maka dalam pelaksanaannya sekolah tidak punya kemampuan untuk mengoptimalkan dana BOS maupun BOSDA untuk membangun sekolah yang berkualitas.

Kurangnya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, maka penulis membatasi masalah pada “belum optimalnya sekolah dalam penggunaan dana bantuan pemerintah sebagai upaya biaya pendidikan gratis” dengan judul “meningkatkan kinerja sekolah dan menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa melalui pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah kejuruan”.

Dengan konsep pembelajaran yang berbasis produk atau teaching factory, maka siswa mendapat pembelajaran life skill yang nantinya akan mempunyai naluri untuk menangkap peluang dan memanfaatkan peluang. Secara tidak langsung siswa yang berhasil memanfaatkan kemampuan dirinya, maka siswa tersebut termasuk dalam kategori siswa yang dapat berwirausaha secara mandiri.

Dari gambaran tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan sekolah tersebut diatas akan terjadi optimalisasi penggunaan dana bantuan pemerintah berupa BOS dan BOSDA. Sehingga dengan pendidikan gratis kinerja sekolah akan terukur dengan produk yang dihasilkan dan capaian siswa yang bisa mandiri setelah lulus sekolah.

Konsep Pembelajaran Blended yang merupakan perpaduan antara Praktek di sekolah dan teori melalui moda daring dengan kluster belajar kerjasama dengan kelurahan ataupun desa. Dari kerjasama dengan kelurahan maupun desa akan menumbuhkan kelompok karang taruna untuk memanfaatkan wifi yang telah dibiayai dengan dana BOS ataupun BOSDA. Banyak kegiatan yang bisa dirancang

oleh kelurahan ataupun desa untuk mengembangkan karang taruna bagi tumbuhnya Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat (UMKM), sehingga diharapkan siswa tidak pergi merantau.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat kerangka kinerja sekolah berbiaya gratis dengan menetapkan tingkatan kinerja sekolah berkelanjutan pada tiga sekolah menengah kejuruan negeri di provinsi Jawa Tengah

Manfaat dari penelitian ini bagi Satuan pendidikan; dapat menjadi alternatif optimalisasi penggunaan dana BOS dan BOSDA; bagi Peneliti lain; dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk peningkatan kinerja satuan pendidikan dengan biaya gratis.

METODE

Desain Penelitian ini adalah penelitian pengembangan R&D. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi kerangka paling cocok untuk mengukur keberlanjutan indek gabungan dari tata letak kinerja sekolah. Data dan sumber penelitian adalah studi kasus; 3 SMK yang berbeda; tipe data; rencana tata letak digital; sumber; otoritas perencanaan lokal; data verifikasi; ground thruthing SMK. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner; uji coba untuk pelaksanaan. Teknik keabsahan data responden; SMK Negeri di Jawa Tengah; jumlah putaran; 3 sekolah. Teknik analisis data adalah statistik deskriptif, statistik inferensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam pasal tersebut tersirat bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, maka dalam pelaksanaan pemerintah wajib menyediakan akses pendidikan bagi mereka tanpa pembatasan dalam hal pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negaranya. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana yang mengakibatkan terjadinya kegiatan belajar mengajar. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan anggaran/dana agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan sekolah, pendidik, sarana dan prasarana bisa terlaksana. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara tidak diperbolehkan menerapkan diskriminasi kepada warga negaranya baik itu warga negara kota maupun pedesaan. Dari proses pendidikan ini lahirlah sumber daya manusia yang terampil dan kompeten dibidangnya. Oleh karena itu warga negara diberikan akses pendidikan gratis dari pendidikan dasar, menengah dan sampai dengan perguruan tinggi.

Untuk pendidikan dasar dan menengah pemerintah pusat telah mengalokasikan dana pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan proporsi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 20% dari besaran anggaran keseluruhan.

Dalam penggunaannya BOS dan BOP ditentukan dengan petunjuk teknis yang telah dirumuskan sebaik-baiknya untuk mendukung terlaksananya operasional pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Efektivitas penggunaan BOS dan BOP tersebut setiap tahunnya dilakukan audit kinerja pada setiap satuan pendidikan tersebut. Sehingga hasil audit ini akan menggambarkan kinerja yang menunjukkan optimalisasi.

Optimalisasi penggunaan anggaran dalam pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan efisien. Sekolah dapat membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mendasari pada raport mutu yang dimiliki setiap tahunnya. Ataupun sekolah dapat membuat Rencana Kerja Jangka Menengah terhadap target yang akan dicapai pada empat tahun yang akan datang sesuai visi, misi dan tujuan sekolah.

Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warganya, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dari pendidikan akan lahir intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi lainnya. Jadi warga diberikan akses pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi secara gratis. Bila sekolah sampai dengan pendidikan menengah atas maupun menengah kejuruan atau juga sampai dengan perguruan tinggi, maka akan dihasilkan kader-kader yang berkualitas untuk mengisi pembangunan.

Menjadi kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran guna terselenggaranya pendidikan sesuai amanah dalam UUD 1945. Bagaimana negara bisa mendanai pendidikan? Yaitu dari sumber alam yang kita miliki. Dengan sumber alam yang ada, baik yang berada di daratan berupa tambang, lautan yang berupa ikan yang melimpah, lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan. Banyak sumber daya alam Indonesia yang belum terkelola menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Saat sekarang dengan keterbatasan sumber daya manusia yang rendah, sumber daya alam yang seharusnya diolah menjadi produk jadi ternyata hanya diolah sampai dengan barang dalam proses.

Mendidik warganya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara, sehingga negara akan mempunyai sumber daya manusia untuk mengeksplorasi sumber alam yang ada. Tidak perlu bergantung lagi pada negara asing untuk mengeksplorasi sumber alam yang ada. Mereka mengambil hasil tambang Indonesia, dan mereka hanya membayar pajaknya. Negara asing telah mengeksploitasi tambang Indonesia, misal PT.

Freeport, PT Newton dan lain-lain, mereka berusaha memurnikan konsentrat yang ada di Indonesia menjadi emas, perak ataupun tembaga. Tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di Indonesia, maka konsentrat yang mereka gali sebagian besar diekspor ke negara Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Tiongkok dan negara-negara Eropa lainnya.

Anggaran pendidikan terkait riset dan pengembangan pendidikan dari tahun ke tahun terjadi pengurangan anggaran. Struktur anggaran yang sekarang ini ada ternyata sebagian besar berisi besaran gaji bagi guru dan dosen.

Saat sekarang pemerintah pusat berusaha mengurangi peran dalam mengurus pendidikan dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU ini semua urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan dan agama. Bidang pendidikan termasuk urusan yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, agar pendidikan di daerah bisa dilaksanakan dengan baik apabila melibatkan semua komponen-komponen masyarakat. Mereka harus diajak bicara tentang pendidikan, maka lahirlah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan upaya pengalihan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat. Merekalah yang menjalankan, mengelola dan mengawasi pendidikan di daerahnya.

Satuan pendidikan dalam hal ini sekolah dalam merancang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus mendasari Rencana Kerja Jangka Menengah yang telah disusun menurut capaian raport mutu sekolah bersama dengan komite sekolah. Sekolah bisa dikatakan optimal dalam menggunakan BOS maupun BOSDA, apabila sekolah dalam penggunaan memasukkan unsur-unsur biaya yang dapat menimbulkan pembelajaran yang menginspirasi siswa untuk berwirausaha.

Dalam pembelajaran produktif, guru membuat pembelajaran praktek yang berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek (project based learning). Pembelajaran yang berbasis proyek menarik minat siswa untuk membuat produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis untuk dijual. Apakah itu berupa barang jadi maupun sparepart dari sebuah barang. Siswa akan terbiasa berpikir bagaimana bahan baku atau bahan praktek mempunyai nilai ekonomis yang meningkat.

Ketua program keahlian dan guru produktif akan merancang bagaimana usaha pembelajaran yang orientasinya teaching factory. Dalam teaching factory ini bisa mengerjakan pekerjaan yang merupakan tuntutan kegiatan belajar mengajar, pesanan produksi dari kerjasama dengan industri ataupun pekerjaan rutin produksi yang merupakan produksi terpasang dari sebuah industri. Dan peningkatan kinerja sekolah dalam praktek siswa akan menjadikan peningkatan skill

(keterampilan) yang bisa dijadikan bekal life skill pada saat terjun di dunia masyarakat.

Perancangan pembelajaran yang berbasis produk ini harus dibuat level entry untuk memungkinkan siswa terkategori siap untuk melaksanakan proses produksi; level training yaitu proses pelatihan dasar-dasar praktek untuk menciptakan skill yang akan berperan pada level produksi; level produksi yaitu proses siswa terjun dalam pembelajaran praktek yang berorientasi pada teaching factory untuk menghasilkan produk yang merupakan pesanan ataupun pekerjaan rutin dari suatu industri; level magang yaitu proses dimana siswa sudah terampil dan kompeten mengerjakan sebuah produk langsung mengerjakan pekerjaan di industri pasangan yang berstandar (quality control).

Pada proses pembelajaran Level Magang ini siswa dalam proses atau akhir kegiatan pembelajarannya mendapatkan sertifikasi kompetensi atau profesi sesuai kompetensinya. Setelah siswa lulus dari sekolah siswa mempunyai pilihan bekerja pada orang lain, mandiri atau kuliah, sehingga dengan pilihannya tersebut sudah merefleksikan dana yang digunakan dalam proses pembelajaran menjadi tepat guna yaitu untuk menciptakan kemandirian dan kebermanfaatan.

KESIMPULAN

Sekolah yang dapat membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan membagi kegiatannya pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan menghitung besaran penggunaan dana dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah sekolah yang mampu menerjemahkan raport mutu dan berusaha untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah bersama komite sekolah.

Kegiatan pembelajaran di sekolah yang sudah terancang dalam pembiayaan di RKAS dengan tujuan melakukan penyerapan dana bantuan BOS dan BOSDA untuk mendidik siswa dengan Metode Teaching factory, maka sekolah tersebut bisa dikatakan telah melakukan upaya peningkatan kinerja dengan penggunaan dana BOS ataupun BOSDA untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa.

REFERENSI

- Agus Yulianto. (2017, March 12). *Negara Wajib Membiayai Pendidikan*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/03/11/ommve5396-negara-wajib-membiayai-pendidikan>.
- Alinda Surya Hadiyasa. (2014). *Permasalahan Pendidikan di Indonesia—Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/alindasurya/54f5e73aa333119f768b4592/permasalahan-pendidikan-di-indonesia>.
- Indonesia, U. U. D. N. R., & Indonesia, U. U. D. N. R. (1945). Tahun 1945. *Jakarta, Gramedia*.